

► JALAN TOL BALI

Wika Pilih Pertahankan 0,4% Saham

JAKARTA—PT Wijaya Karya (Wika) Tbk memilih bertahan untuk tidak melepas kepemilikan saham di PT Jasamarga Bali Tol, meski Menteri BUMN Dahlan Iskan menyarankan BUMN melepas saham minoritas di perusahaan jalan tol tersebut.

Dimas Novita Sari
redaksi@bisnis.co.id

Direktur Wika Budi Harto mengatakan perseroan tidak akan melepas dan hanya akan mengalami dilusi dalam kepemilikan saham perseroan di Jasamarga Bali Tol.

"Tidak, biar saja untuk kenang-kenangan," katanya sesuai rapat umum pemegang saham perseroan, Kamis (25/4).

Sebelumnya, Menteri BUMN menyarankan agar perusahaan pelat merah yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan tol Bali dan menjadi pemegang saham minoritas dianjurkan keluar dari proyek tersebut.

Di Jasamarga Bali tol, pemilik jalan tol di atas laut sepanjang 9,7 kilometer tersebut, terdapat tujuh BUMN sebagai pemegang saham, yakni PT Jasamarga Bali Tol yakni PT Jasa Marga Tbk, PT Angkasa Pura I, PT Pelindo III, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Hutama Karya, dan PT Pengembangan Pariwisata Bali.

Adapun pemilik saham lainnya

► Saham sebagai kenang-kenangan.

► Adhi Karya siap hengkang.

► BPJT belum terima dokumen revisi kepemilikan.

adalah Pemprov Bali dan Pemkab Badung.

Menurut Dahlan, BUMN pemegang saham minoritas di Jasamarga Bali Tol sebaiknya menjual sahamnya kepada investor agar modal awal yang telah dikeluarkan dapat diperoleh kembali.

"Saya mau mereka [BUMN dan pemegang saham minoritas] keluar dari proyek jalan tol Bali karena mereka pemegang saham minoritas bukan mayoritas," tutur Dahlan, Rabu (24/4).

Menurutnya, penjualan kepemilikan saham tersebut merupakan bisnis yang sudah umum dilakukan di perusahaan kontraktor.

Sementara itu, Direktur PT Adhi Karya Tbk Kiswodarmawan mengatakan instruksi Menteri BUMN untuk melepaskan kepemilikan saham tidak masalah bagi perusahaan.

"Kami nantinya juga akan *pull out* dari sana, jadi tidak masalah dengan dilusi saham tersebut," katanya.

Menurutnya, dengan melepas saham tersebut maka perusahaan dapat menggunakan uang tersebut untuk bisnis lainnya. "Kalau tidak salah hanya Rp14 miliar, itu kan sangat kecil sekali, bisa dipakai untuk yang lain."

KESEPAKATAN AWAL

Budi menjelaskan dari awal masuknya perseroan ke perusahaan tol Nusa Bali-Tanjung Benoa

Pemilik Baru Saham PT Jasamarga Bali Tol

Perusahaan	Saham Baru	Sebelumnya
PT Jasa Marga Tbk	55	60
PT Pelindo III	17,98	20
PT Angkasa Pura I	8	10
PT Wijaya Karya*	--	5
PT Hutama Karya	1	2
PT Adhi Karya Tbk	1	2
PT Pengembangan Pariwisata Bali	1	1
Pemprov Bali	8,01	--
Pemkab Badung	8,01	--

Sumber: Jasamarga Bali Tol
Ket: *) Dalam proses pelepasan

tersebut telah terjadi kesepakatan yang akan menggerus kepemilikan saham.

"Sudah terjadi kesepakatan dari awal, kalau badan usaha daerah tingkat I dan II Badung dan Bali akan masuk di tengah jalan, sehingga saham kami akan mengalami dilusi kepemilikan dari 5% menjadi 0,4%," jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, kemungkinan terjadinya dilusi saham tersebut sudah disetujui oleh para pemegang saham perseroan.

"Kami akan siapkan segala administrasi yang terkait dan kemudian akan kami ajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum," tambahnya.

Seperti yang diketahui, BUMN Karya yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Hutama Karya memiliki saham minoritas di proyek jalan tol senilai Rp2,48 triliun.

Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol mengatakan dilusi saham BUMN Karya yang berada di PT Jasa Marga Bali Tol belum dapat dipastikan, menyusul belum masuknya usulan revisi kepemilikan saham.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazaly menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen mengenai revisi kepemilikan saham.

"Revisi usulan belum masuk. Yang jelas, usulan yang masuk harus mampu dibuktikan dengan dokumen keuangannya, apakah ada dananya atau tidak. Kalau tidak ada, ya...tidak boleh," katanya melalui pesan singkat kepada *Bisnis*, Kamis (25/4).

Lebih lanjut, Gani mengatakan adanya kesepakatan akan tergerusnya saham BUMN akibat perjanjian masuknya BUMD Bali tidak menyalahi aturan.

"Boleh saja atas persetujuan Menteri PU tentunya, yang jelas kami harus evaluasi terlebih dahulu," jelasnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama Jasa Marga Bali Tol Akhmad Tito Karim mengatakan saat ini perubahan komposisi saham tersebut masih dalam proses.

"Belum ada apa-apa, masih proses, mungkin minggu depan," katanya. (Zulfriati) 